



桃園市群眾服務協會  
Serve the People Association



# Briefing Paper No. 3

## Wi-Fi untuk Hak-hak Fundamental Ketenagakerjaan ABK

Oktober 2023

Penulis: Johanna Lee and Sahiba Gill  
Editor: Sharlene Chen



# DAFTAR ISI

I. Pengantar	1
II. Latar belakang: ABK pada Industri Perikanan Laut Lepas Taiwan	2
A. Gambaran umum terkait industri perikanan laut lepas Taiwan	
B. Kondisi kerja ABK kapal penangkap ikan laut lepas di Taiwan	3
1. <i>Isolasi total</i>	5
2. <i>Kondisi kerja yang berbahaya</i>	5
3. <i>Keterbatasan perlindungan bagi pekerja migran</i>	8
III. Isolasi yang dialami ABK pada kapal-kapal penangkap ikan laut lepas tanpa adanya akses Wi-Fi merupakan pelanggaran serius terhadap hak berserikat yang dijamin hukum internasional.	8
A. Akses serikat di tempat kerja adalah komponen inti dalam mewujudkan kebebasan berserikat	11
B. ABK memerlukan Wi-Fi untuk mengakses serikat dari kapal-kapal penangkap ikan laut lepas	13
C. K188 harus dibaca dalam konteks kebebasan berserikat di laut	
IV. Pentingnya memastikan kebebasan berserikat untuk mewujudkan seluruh hak-hak fundamental ketenagakerjaan ABK perikanan laut lepas di Taiwan	15
A. Lingkungan kerja yang aman dan sehat: Keberadaan Wi-Fi yang selaras dengan prinsip kebebasan berserikat akan membantu ABK menyelamatkan diri dari kondisi kerja yang berbahaya	19
B. Kerja paksa: Akses Wi-Fi yang sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat mengeluarkan ABK dari situasi yang terisolir dan memastikan pertanggungjawaban pemberi kerja atas indikator-indikator kerja paksa ILO	19
C. Non-diskriminasi: Penyediaan akses Wi-Fi yang sejalan dengan prinsip kebebasan berserikat membantu ABK melindungi hak terhadap kebebasan berserikat	21
Mitra-mitra Inti dalam Kampanye Ini	22
Referensi	24

## I. PENGANTAR

Para ABK migran, serikat ABK, dan berbagai aliansi internasional telah meluncurkan kampanye berjudul “Wi-Fi untuk ABK Sekarang”. Kampanye ini mendorong kewajiban akses Wi-Fi bebas biaya bagi ABK di seluruh kapal penangkap ikan laut lepas berbendera Taiwan. Akses Wi-Fi merupakan syarat utama untuk mewujudkan hak berserikat dan hak melakukan perundingan bersama bagi ABK agar mereka dapat mengakses hak-hak fundamental perburuhan sebagaimana telah diatur dalam hukum internasional.<sup>1</sup> Taiwan, Amerika Serikat, dan pangsa pasar lainnya, serta para pemilik kapal, konsumen produk makanan laut di seluruh belahan dunia, serta para investor—masing-masing memiliki peran penting untuk mewujudkan akses Wi-Fi bagi ABK tersebut.

Tim kampanye “Wi-Fi untuk ABK Sekarang” menyajikan briefing paper ketiga ini, “Wi-Fi untuk Hak-hak Fundamental Ketenagakerjaan ABK”, untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa keterbatasan akses terhadap Wi-Fi bagi ABK di kapal penangkap ikan laut lepas merupakan bentuk pelanggaran atas hak berserikat, yakni dengan menciptakan “zona tanpa serikat” di tengah laut. Situasi ini kemudian menciptakan kerentanan yang berujung pada berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak fundamental ketenagakerjaan ABK, termasuk hak atas kondisi kerja yang sehat dan aman tanpa kerja paksa maupun diskriminasi berdasarkan status kewarganegaraan atau status migrasi.

Briefing ini menyajikan informasi tentang ABK yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan laut lepas berbendera Taiwan serta kondisi kerja mereka—diikuti dengan penjelasan tentang bagaimana ketiadaan akses Wi-Fi pada kapal-kapal tersebut menciptakan “zona tanpa serikat pekerja” dan melanggar hak atas kebebasan berserikat. Briefing ini juga menjelaskan bagaimana ketersediaan akses Wi-Fi yang selaras dengan prinsip kebebasan berserikat di atas kapal merupakan komponen utama dalam mewujudkan seluruh hak ketenagakerjaan ABK pada industri perikanan.

Diluncurkan pada Februari 2023, kampanye “Wi-Fi untuk ABK Sekarang” dipimpin oleh Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI), sebuah organisasi nelayan Indonesia yang berbasis di Donggang, Taiwan, serta didukung oleh sebuah koalisi yang terdiri dari organisasi-organisasi yang melakukan advokasi hak asasi manusia, hak-hak ketenagakerjaan, dan hak pekerja migran yang berbasis di Taiwan, Amerika Serikat, dan Inggris: Global Labor Justice - International Labor Rights Forum (GLJ-ILRF), Taiwan Association for Human Rights (TAHR), Stella Maris Kaohsiung, Serve the People’s Association (SPA), dan Humanity Research Consultancy (HRC).



## II. LATAR BELAKANG: ABK PADA INDUSTRI PERIKANAN LAUT LEPAS TAIWAN

Praktik penangkapan ikan laut lepas terjadi di luar yurisdiksi negara tempat kapal-kapal penangkap ikan berasal, dan biasanya dilakukan di wilayah perairan yang sangat jauh dari negara asal kapal tersebut.<sup>2</sup> Kategori ini mencakup praktik penangkapan ikan di laut lepas, dalam yurisdiksi laut sebuah negara, atau 200 mil dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain.<sup>3</sup> Sejak penemuan kapal pemukat bertenaga uap di Inggris pada akhir abad ke-19, praktik penangkapan ikan di laut lepas telah berkembang pesat secara global.<sup>4</sup> Dari 1950-2014, jumlah armada kapal penangkap ikan di dunia meningkat dari 1,7 juta menjadi 3,7 juta kapal,<sup>5</sup> dengan wilayah penangkapan yang juga meluas dari 60% menjadi 90% dari total perairan dunia.<sup>6</sup> Saat ini, lima besar negara yang terlibat dalam industri perikanan laut lepas berdasarkan persentase meliputi Tiongkok (38%), Taiwan (21%), Jepang (10%), Korea Selatan (10%), dan Spanyol (10%); jumlah armada dari negara-negara tersebut mencapai 90% dari seluruh armada kapal penangkap ikan laut lepas di dunia.<sup>7</sup>





## A. Gambaran umum terkait industri perikanan laut lepas Taiwan

Taiwan adalah pemain kunci dalam industri perikanan laut lepas di dunia. Sebagai negara terbesar kedua dalam industri ini,<sup>8</sup> jumlah armada Taiwan mencapai 1.100 kapal penangkap ikan laut lepas berbendera Taiwan dan 259 kapal berstatus flag of convenience (FOC), yakni kapal-kapal yang dimiliki atau didanai oleh warga negara Taiwan tetapi beroperasi dengan izin di negara lain.<sup>9</sup> Industri perikanan laut lepas Taiwan berada di antara 25 produsen terbesar di dunia,<sup>10</sup> dengan jumlah ekspor tahunan mencapai sekitar 1 miliar dolar AS.<sup>11</sup>

Dari tahun ke tahun, berbagai organisasi telah mencatat banyak bentuk pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap pekerja migran pada kapal-kapal penangkap ikan laut lepas berbendera Taiwan.<sup>12</sup> Mereka telah menemukan seluruh indikator kerja paksa yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO) pada kapal-kapal penangkap ikan laut lepas berbendera Taiwan: penyalahgunaan kerentanan, penipuan, pembatasan pergerakan, isolasi, kekerasan fisik, intimidasi dan ancaman, penahanan dokumen identitas, penahanan gaji, jeratan utang, kondisi hidup dan kerja yang eksploitatif, dan kerja lembur yang berlebihan.<sup>13</sup> Beberapa kasus yang dimuat dalam laporan tersebut mencakup kasus *Giant Ocean*, *Fu Tsz Chiun*, *Tunago No. 61*, *Fuh Sheng 11*, *Fwu Maan No. 88*, *Shin Jaan Shin*, *Chin Chun No. 12*, *Da Wang*, *Lien Yi Hsing No. 12*, *Wei Ching*, *Longline A*, *Longliner B*, dan *Win Far No. 63*.<sup>14</sup> Selama satu dekade terakhir, Uni Eropa (EU), pemerintah Amerika Serikat, dan pemerintah Taiwan mengakui adanya risiko praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (IUU) serta kerja paksa pada kapal-kapal





penangkap ikan laut lepas berbendera Taiwan. Pada 1 Oktober 2015, EU mengeluarkan “kartu kuning” untuk Taiwan karena dianggap telah gagal menerapkan regulasi IUU,<sup>15</sup> walaupun kemudian kartu tersebut dicabut pada 2019 setelah Taiwan melakukan beberapa perbaikan.<sup>16</sup>

Namun, pelanggaran hak ketenagakerjaan terus terjadi. Dari 2019-2020, bagian Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (CBP) mengeluarkan Withhold Release Orders (WRO) terhadap empat kapal Taiwan, yang mana tiga di antaranya masih berlaku: Tunago No. 61 (diterbitkan pada 6 Februari 2019 dan dicabut pada 1 April 2020), Yu Long No. 2 (diterbitkan pada 11 Mei 2020), Da Wangi (diterbitkan pada 8 Agustus 2020), dan Lien Yi Hsing No. 12 (diterbitkan pada 31 Desember 2020).<sup>17</sup> Selain itu, Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat (DOL) mencatat ikan tangkapan Taiwan dalam Daftar Barang-barang yang Diproduksi oleh Anak atau Kerja Paksa—untuk pertama kalinya pada 2020 dan kemudian pada 2022.<sup>18</sup>

Pemerintah Taiwan turut mengakui adanya risiko praktik IUU dalam industri perikanan laut lepasnya setelah sepakat bertindak sebagai negara prioritas dalam Gugus Kerja Antarbadan Amerika Serikat untuk penerapan Strategi Lima-Tahun Nasional untuk Memerangi Praktik Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (2022-2026).<sup>19</sup> Strategi nasional ini diumumkan beberapa bulan setelah pemerintahan Biden berkomitmen untuk “mengatasi masalah penangkapan ikan IUU, termasuk yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan laut lepas, serta berbagai pelanggaran hak ketenagakerjaan, seperti penggunaan kerja paksa dalam rantai pasokan makanan laut” dalam Memorandum Keamanan Nasional 2022 (NSM).<sup>20</sup>

Baru-baru ini, laporan dua tahunan yang disusun oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Fisheries dan diserahkan kepada Kongres mencatat bahwa beberapa kapal milik Taiwan terlibat dalam praktik penangkapan ikan IUU.<sup>21</sup> Laporan tersebut juga menyebutkan maraknya praktik kerja paksa dalam industri perikanan laut lepas Taiwan.<sup>22</sup>

## **B. Kondisi kerja ABK kapal penangkap ikan laut lepas di Taiwan**

Pelanggaran hak ketenagakerjaan sering dialami oleh para ABK yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan laut lepas Taiwan. Bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan sangat terisolir, para ABK tersebut umumnya merupakan pekerja migran yang berasal dari negara-negara tetangga. Mereka memegang visa kerja





yang terikat, serta tidak mendapatkan berbagai bentuk perlindungan yang dijamin dalam undang-undang ketenagakerjaan Taiwan.

### *1. Isolasi total*

Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan praktik kerja paksa pada kapal-kapal penangkap ikan laut lepas Taiwan adalah kondisi isolasi total yang dialami oleh para ABK ketika mereka berada di laut selama berbulan-bulan, yang mana mereka tidak dapat mendarat di titik pemberangkatan. Selama pelayaran, ABK menghabiskan waktu dari enam bulan hingga tiga tahun.<sup>23</sup>

Para ABK yang bekerja pada kapal-kapal penangkap ikan laut lepas terisolir dari dunia luar selama mereka bekerja dan tinggal di atas kapal—selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun per pelayaran. Karena kapal-kapal penangkap ikan laut lepas berbendera Taiwan tidak menjamin akses komunikasi pribadi bagi ABK di laut, ABK tidak dapat menghubungi keluarga, perwakilan serikat pekerja, lembaga penyedia layanan, atau lembaga pemerintah apa pun selama mereka berada di kapal—termasuk saat mereka tidak tengah bekerja, karena ABK bekerja dan tinggal di kapal. Walaupun sebagian besar ABK memiliki ponsel masing-masing, mereka tidak dapat menggunakan ponsel tersebut selama di laut karena ketiadaan akses Wi-Fi. Isolasi merupakan indikator penting kerja paksa karena kondisi tersebut mempertegas ketimpangan relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja, terutama dalam konteks indikator-indikator kerja paksa yang sering ditemui pada industri perikanan laut lepas Taiwan.<sup>24</sup> Dengan kondisi yang sangat terisolir tersebut, saat ini ABK baru dapat melaporkan kasus pelanggaran hak yang



terjadi di tengah laut kepada serikat ketika mereka telah mendarat—seringkali berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sejak pelanggaran tersebut terjadi. Sebagai contoh, pada kapal berbendera Taiwan bernama Fwu Maan No. 88, kapten kapal menahan paspor para ABK dan melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap mereka, tetapi ABK baru dapat melayangkan laporan satu tahun kemudian ketika mereka mendarat di Port Moresby, Papua Nugini.<sup>25</sup> Kondisi kerja yang sangat terisolir dan ketidakmampuan ABK melaporkan kasus pelanggaran selama satu tahun—atau bahkan lebih pada kasus lain—memberikan kesempatan kepada pemilik kapal untuk mangkir dari tanggung jawab mereka terhadap tindakan-tindakan ilegal seperti pelanggaran hak ketenagakerjaan dan praktik penangkapan ikan IUU.

Kebijakan yang baru-baru ini disahkan oleh Taiwan, yakni untuk membatasi durasi pelayaran ABK perikanan, tidak menyelesaikan masalah kondisi isolasi yang dialami oleh ABK pada kapal-kapal penangkapan ikan laut lepas. Pada Juni 2022, pemerintah Taiwan menetapkan bahwa ABK hanya diperbolehkan berlayar selama maksimal 10 bulan secara berturut-turut.<sup>26</sup> Ketentuan terkait durasi pelayaran maksimal untuk kapal penangkap ikan laut lepas ini menjamin ABK untuk dapat mendarat di pelabuhan mana pun—tidak harus di pelabuhan tempat mereka mulai berlayar—sebanyak satu kali dalam 10 bulan. Ketentuan baru tersebut memberikan jaminan kepada ABK untuk dapat mendarat di pelabuhan mana pun—tidak harus pelabuhan di Taiwan—sekali dalam kurun waktu 10 bulan. Walaupun kapal-kapal yang terdaftar di Kaohsiung, Taiwan, diwajibkan untuk mendarat di Kaohsiung, kapal-kapal yang terdaftar di pelabuhan asing diperbolehkan untuk mendarat di pelabuhan lain, baik di Taiwan maupun di negara lain.<sup>27</sup>

Alhasil, banyak kapal penangkap ikan berbendera Taiwan akhirnya mendaratkan hasil tangkapan mereka di pelabuhan-pelabuhan internasional atau basis-basis perikanan di luar negeri, alih-alih di pelabuhan-pelabuhan di Taiwan.”<sup>28</sup> Penting untuk dicatat bahwa ABK tidak mendapatkan jaminan akses terhadap layanan-layanan dasar di seluruh pelabuhan, seperti akses terhadap Wi-Fi, pelayanan medis, pelayanan keagamaan, serikat pekerja, organisasi yang memberikan pelayanan kepada pekerja migran, serta fasilitas-fasilitas rekreatif maupun kebersihan.<sup>29</sup> Sebaliknya, pelabuhan-pelabuhan asing sebagian besar dibatasi dengan pagar dan barikade sehingga ABK tidak dapat turun dari kapal “untuk mengakses berbagai layanan atau melaporkan keluhan.”<sup>30</sup> Terlebih, walaupun ABK memiliki jaminan untuk dapat mendarat di pelabuhan Taiwan



setiap 10 bulan sekali dan mengakses berbagai pelayanan di darat, mereka tetap harus hidup dan bekerja dengan kondisi terisolir secara penuh selama 10 bulan di laut.

Kondisi isolasi di laut bukanlah aspek intrinsik dari pekerjaan di laut. Sebaliknya, sebagian besar pekerja di laut telah mendapatkan hak terhadap Wi-Fi di laut dan telah lama menikmati akses komunikasi dan akses terhadap serikat pekerja. Pada 2022, Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 (*Maritime Labour Convention* atau MLC)—yang memuat hak-hak pelaut, istilah umum yang merujuk pada hampir seluruh kategori pekerja di laut kecuali nelayan—direvisi untuk mewajibkan akses Wi-Fi atau internet bagi seluruh pelaut. Namun, karena definisi pelaut tidak mencakup nelayan, para nelayan yang bekerja pada kapal-kapal penangkap ikan laut lepas tidak menikmati hak yang tertuang dalam MLC 2006 tersebut walaupun, sama dengan pelaut, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun di tengah lautan. Walaupun begitu, amandemen MLC 2006 menunjukkan bahwa penyediaan akses Wi-Fi tidak hanya mungkin diberikan, tetapi juga dianggap sebagai hak dasar untuk seluruh pekerja di laut.

Selain itu, berdasarkan pengalaman beberapa serikat yang telah melakukan pengorganisasian pelaut, terdapat kesempatan untuk mendorong hak berserikat di laut. Selama lebih dari 50 tahun, International Transport Workers' Federation (Federasi Pekerja Transportasi Internasional atau ITF) dan Global Union Federation (GUF) atau Federasi Serikat Global untuk serikat-serikat pekerja transportasi<sup>31</sup> telah menjamin hak berserikat para pekerja kapal pengirim barang. ITF telah membangun jejaring inspektor kapal yang terdiri dari lebih dari 100 inspektor di seluruh belahan dunia. Mereka mendorong kondisi kerja layak dalam industri kemaritiman internasional dengan menegakkan konvensi-konvensi internasional dan berbagai perjanjian bersama yang telah disepakati oleh ITF—di pelabuhan-pelabuhan tempat kapal mendarat. Mereka juga





memperjuangkan hak pekerja untuk dapat turun dari kapal di pelabuhan-pelabuhan, melakukan inspeksi kapal, dan membantu pekerja melaporkan keluhan baik ketika berada di dalam kapal maupun ketika berada di darat.<sup>32</sup>

## *2. Kondisi kerja yang berbahaya*

Penangkapan ikan dianggap sebagai salah satu industri paling berbahaya di dunia karena adanya kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, terjadi di laut lepas, dan menggunakan peralatan yang berbahaya.<sup>33</sup> Setiap tahun, sekitar 100.000 kematian terjadi akibat aktivitas penangkapan ikan—”jumlah yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi” menurut para peneliti.<sup>34</sup> Selain itu, banyak ABK lain yang mengalami cedera serius akibat aktivitas penangkapan ikan.<sup>35</sup> ABK yang bekerja pada kapal-kapal penangkap ikan laut lepas jauh lebih rentan karena banyak kapal penangkap ikan laut lepas yang melakukan aktivitas penangkapan secara ilegal dan berbahaya—seperti menangkap ikan tanpa perlengkapan pengaman, tidak membatasi jumlah jam kerja, atau berlayar jauh dalam durasi yang lebih lama tanpa memiliki peralatan yang memadai.<sup>36</sup>

Namun, para ABK kapal penangkap ikan laut lepas seringkali tidak mendapatkan bantuan medis ketika mereka mengalami kecelakaan kerja—apalagi menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau nyawa mereka. Walaupun hukum internasional telah mewajibkan seluruh pemilik kapal untuk memberikan bantuan medis kepada ABK dalam situasi darurat melalui komunikasi radio atau satelit<sup>37</sup>—dan walaupun pemilik kapal diharapkan untuk “memberikan bantuan medis dengan segera pada fasilitas kesehatan terdekat dan menanggung biaya pengobatan serta biaya lainnya” ketika ABK sakit atau mengalami kecelakaan kerja<sup>38</sup>—terdapat beberapa kasus yang mana kapten kapal menolak mendaratkan kapal dan memberikan pengobatan medis kepada ABK dalam situasi darurat.<sup>39</sup> Karena ABK berada dalam situasi yang terisolir di laut—yakni bekerja dan hidup di atas kapal—tidak mungkin mereka dapat menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan mereka.

## *3. Keterbatasan perlindungan bagi pekerja migran*

Industri perikanan laut lepas Taiwan sangat bergantung pada pekerja migran, dengan jumlah pekerja migran mencapai 22.000 individu dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. ABK yang bekerja di kapal-kapal laut lepas tersebut mayoritas adalah pekerja migran, sementara tim manajemen—yakni kapten, petugas kepala, dan kepala teknisi—umumnya warga negara Taiwan.<sup>40</sup>



Taiwan mengeluarkan ABK perikanan laut lepas dari skema perlindungan yang dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan negara tersebut. Skema ketenagakerjaan dua-tingkat yang diberlakukan oleh Taiwan membedakan ABK kapal perikanan pesisir dan ABK perikanan laut lepas. Dalam undang-undang, ABK perikanan laut lepas dianggap bekerja di luar negeri—dan oleh karena itu mereka dikeluarkan dari cakupan *Labor Standards Act*, atau Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Taiwan, yang berlaku untuk hampir seluruh pekerja di Taiwan dan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sebaliknya, ABK perikanan laut lepas diawasi oleh Badan Perikanan—yang merupakan bagian dari Kementerian Pertanian—dan terikat dengan *Regulations on the Authorization and Management of Overseas Employment of Foreign Crew Members* (Peraturan tentang Otorisasi dan Manajemen Ketenagakerjaan di Luar Negeri bagi Awak Kapal Asing).<sup>41</sup> Dibandingkan dengan *Labor Standards Act*, Peraturan ini menetapkan upah yang lebih rendah, ketentuan tentang waktu kerja yang kurang tegas, dan kebijakan asuransi dan inspeksi ketenagakerjaan yang lebih lemah untuk ABK perikanan laut lepas.<sup>42</sup>

Dengan situasi tersebut, para pekerja migran—yang merupakan mayoritas pekerja pada industri perikanan laut lepas Taiwan—sangat rentan terhadap eksploitasi akibat status migrasi mereka. Dalam proses rekrutmen, mereka direkrut sebagai pekerja sementara dengan skema visa yang terikat, yakni status visa mereka bergantung pada masa berlaku kontrak kerja.<sup>43</sup> ABK migran juga tidak diizinkan berganti pemberi kerja setelah mereka direkrut.<sup>44</sup> Hal ini berarti pemberi kerja yang memecat pekerja juga memiliki kekuasaan untuk memulangkan mereka. Selain itu, jika pekerja ingin berganti pemberi kerja, mereka harus memutuskan kontrak terlebih dahulu dan pulang ke negara asal tanpa melalui proses pemeriksaan indikator kerja paksa atau pelanggaran lainnya sebelum mencari pekerjaan baru.<sup>45</sup> Agen perekrut dan pemberi kerja juga sering membebankan biaya rekrutmen yang sangat tinggi sehingga pekerja terjebak dalam lilitan utang,<sup>46</sup> yang membuat mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaan karena kewajiban untuk membayar utang.<sup>47</sup> Alhasil, tekanan utang, ancaman deportasi jika kehilangan pekerjaan, dan keterikatan dengan pemberi kerja di bawah skema kerja yang berlaku di Taiwan—memaksa ABK untuk bertahan di tengah situasi kerja yang eksploitatif.



### III. ISOLASI YANG DIALAMI ABK PADA KAPAL-KAPAL PENANGKAP IKAN LAUT LEPAS TANPA ADANYA AKSES WI-FI MERUPAKAN PELANGGARAN SERIUS TERHADAP HAK BERSERIKAT YANG DIJAMIN HUKUM INTERNASIONAL.

Kapal-kapal penangkap ikan laut lepas Taiwan telah menjadi “zona tanpa serikat” akibat ketiadaan akses Wi-Fi bagi ABK. Hal ini sudah jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh hukum internasional. Kebebasan berserikat bagi pekerja dan serikat pekerja dilindungi oleh Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip Fundamental dan Hak-hak di tempat Kerja, Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87) (C87), dan Konvensi tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98) (C98).

Selain itu, hak pekerja migran terhadap kebebasan berserikat juga dimuat dalam Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Pasal 22 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; Pasal 8 pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan Pasal 26 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarga Mereka. Pelapor Khusus PBB untuk isu Hak Asasi Migran turut mengakui pentingnya hak berserikat bagi pekerja migran, yang secara umum lebih rentan terhadap eksploitasi daripada pekerja lokal—terutama pekerja migran yang bekerja di tempat-tempat terisolir dan informal, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja kelautan.<sup>48</sup>

Sub-bab di bawah menjelaskan mengapa akses serikat pekerja di tempat kerja merupakan komponen inti dalam mewujudkan kebebasan berserikat; mengapa akses ABK terhadap serikat memerlukan Wi-Fi di atas kapal-kapal penangkap ikan laut lepas; dan mengapa hak ABK terhadap akses komunikasi dalam hukum internasional harus dibaca dalam konteks kebebasan berserikat.



## A. Akses serikat di tempat kerja adalah komponen inti dalam mewujudkan kebebasan berserikat

Dalam puluhan kasus, Komite Kebebasan Berserikat ILO (CFA) mengonfirmasi secara terang-terangan bahwa perwakilan serikat pekerja memiliki hak untuk mengakses tempat kerja sebagai bagian dari kebebasan berserikat.<sup>49</sup> ILO CFA menekankan bahwa hak untuk mengakses tempat kerja tersebut perlu diwujudkan utamanya di tempat-tempat kerja yang terisolir secara geografis, dan yang mana para pekerja turut tinggal di tempat kerja mereka.<sup>50</sup> Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ABK yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan laut lepas Taiwan tidak memiliki akses terhadap serikat ataupun perwakilan serikat di tempat kerja mereka. Hal ini penting untuk diperhatikan karena ABK juga tinggal di atas kapal, dan mereka tidak dapat bergabung dalam kegiatan-kegiatan serikat atau melaporkan keluhan di luar jam kerja.

Seperti yang telah dijelaskan oleh ILO CFA, hak untuk mengakses tempat kerja merupakan komponen dasar untuk memastikan kebebasan berserikat karena hak tersebut memberikan kesempatan kepada serikat pekerja untuk “berkomunikasi dengan pekerja untuk memberitahukan kepada mereka tentang manfaat berserikat”<sup>51</sup> dan “memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi perwakilan”<sup>52</sup> sehingga mereka dapat “memajukan dan memperjuangkan kepentingan anggota-anggota mereka.”<sup>53</sup> Hak atas akses ini tidak hanya terbatas pada akses secara fisik saja, tetapi juga mengakses tempat kerja dengan menggunakan email untuk menghubungi para pekerja.<sup>54</sup> Tanpa akses secara fisik dan digital terhadap tempat kerja, serikat pekerja tidak dapat menjalankan kegiatan-kegiatan perserikatan mereka secara normal dan bebas. Tanpa adanya sarana komunikasi secara daring maupun luring, serikat pekerja tidak dapat menghubungi pekerja dan melakukan pengorganisasian, dan para pekerja pun juga tidak dapat melaporkan keluhan mereka kepada serikat. Oleh sebab itu, kebebasan berserikat memerlukan adanya akses komunikasi untuk ABK di tempat kerja.

ILO CFA telah menegaskan bahwa hak serikat untuk mengakses tempat kerja juga berlaku untuk kapal-kapal penangkap ikan laut lepas yang diakui lebih sulit untuk diakses—baik karena kondisi yang berbahaya maupun kondisi yang terisolir secara geografis. Sebagai contoh, ILO CFA menjelaskan secara khusus bahwa serikat memiliki hak untuk mengakses sektor-sektor pertambangan



dan perminyakan, walaupun sektor-sektor tersebut dianggap berbahaya.<sup>55</sup> ILO CFA juga menegaskan hak untuk mengakses sektor perkebunan dan rumah tangga—kedua sektor tersebut sulit diakses serikat karena terletak jauh atau terisolir.<sup>56</sup> ILO CFA menjelaskan bahwa hak untuk mengakses tempat kerja tersebut semakin penting untuk konteks di atas karena pekerja perkebunan dan rumah tangga—sebagaimana ABK perikanan laut lepas—juga tinggal di tempat mereka bekerja.<sup>57</sup> ILO CFA dan Komite Ahli ILO untuk Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (CEACR) menekankan bahwa hak serikat untuk mengakses tempat kerja berlaku bahkan untuk sektor-sektor yang sulit diakses asalkan kegiatan-kegiatan serikat tidak menimbulkan kerusakan properti dan tidak mengganggu kegiatan kerja selama jam kerja atau mengganggu fungsi perusahaan.<sup>58</sup>

Menurut Pelapor Khusus PBB untuk Hak Kebebasan untuk Berkumpul secara Damai dan Berserikat, Clément Nyaletsossi Voule, internet sangat penting untuk kelompok-kelompok marginal yang bekerja di ruang-ruang yang terisolir—seperti pekerja rumah tangga atau pekerja migran yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan laut lepas—untuk dapat mengakses hak berserikat.<sup>59</sup> Pelapor Khusus PBB tersebut menuliskan pernyataan tersebut dalam Laporan Tematik untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB 2019: “[T]eknologi seperti itu menjadi alat yang penting bagi para pengorganisir yang berusaha untuk mengorganisir sebuah kelompok yang besar secara cepat dan efektif, dengan biaya yang terjangkau, dan juga menjadi ruang-ruang daring yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang dimarginalisasi oleh masyarakat...”<sup>60</sup> Selaras dengan pernyataan ini, Dewan Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa internet sangat penting dalam situasi yang mana berkumpul secara luring tidak memungkinkan, sebagaimana yang terjadi pada ABK perikanan laut lepas: “dengan keterbatasan untuk berkumpul secara fisik, [...] sangat penting [...] untuk memastikan bahwa akses terhadap internet dimiliki oleh seluruh masyarakat dunia dengan harga terjangkau, serta menghormati dan melindungi hak privasi masing-masing individu.”<sup>61</sup>





## B. ABK memerlukan Wi-Fi untuk mengakses serikat dari kapal-kapal penangkap ikan laut lepas

Kapal-kapal penangkap ikan laut lepas milik Taiwan biasanya dilengkapi dengan satu telepon satelit untuk mencari bantuan medis dalam situasi darurat, tetapi keberadaan telepon satelit tidak cukup membantu serikat untuk mengakses tempat kerja—selaras dengan prinsip kebebasan berserikat—ketika kapal tersebut tengah berlayar. Setiap kapal penangkap ikan laut lepas biasanya dilengkapi dengan setidaknya satu telepon satelit—sesuai dengan Pasal 29 dalam K188, yang mewajibkan seluruh kapal penangkap ikan dapat melakukan komunikasi radio atau satelit dengan individu atau penyedia layanan di darat yang dapat memberikan nasihat medis.<sup>62</sup> Akan tetapi, keberadaan telepon satelit tidak membantu ABK untuk mengakses hak kebebasan berserikat karena telepon satelit tidak dapat digunakan untuk menghubungi serikat secara efektif, tidak aksesibel, dan tidak melindungi hak privasi ABK.

Sebagaimana telah dijelaskan pada *Briefing Paper* No. 2 untuk kampanye ‘Wi-Fi untuk ABK Sekarang’,<sup>63</sup> secara umum, telepon satelit tidak memiliki fungsi yang memadai untuk membantu ABK menghubungi serikat ketika mereka berada di laut. Fungsi telepon satelit hanya terbatas pada panggilan suara dan pesan singkat (SMS).<sup>64</sup> Sebaliknya, Wi-Fi satelit membantu ABK untuk melakukan panggilan video dan suara; mengirim pesan singkat, foto, dan video; serta mengakses internet, yang berarti ABK juga dapat mengakses email, mesin pencari, media sosial dan berita, dan aplikasi ponsel. Semua ini adalah fungsi-fungsi penting yang memungkinkan ABK untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan dunia luar. Tanpa adanya akses Wi-Fi di atas kapal, ABK tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan berikut—di antara lain—yang penting untuk memastikan hak mereka terhadap kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama:

- Melakukan pencarian di internet untuk mendapatkan materi-materi edukatif tentang hak-hak mereka (misalnya, artikel dan video);
- Mencari informasi kontak serikat pekerja, NGO, atau badan pemerintah untuk dimintai bantuan;
- Melaporkan keluhan melalui mekanisme aduan online yang dimiliki oleh serikat pekerja, NGO, atau badan pemerintahan;



- Mendapatkan kabar terbaru tentang kegiatan-kegiatan serikat dengan cara mengakses buletin serikat pekerja, situs web serikat pekerja, maupun grup online (seperti Whatsapp, Line, atau Signal);
- Mengirim atau menerima email atau pesan singkat kepada dan dari perwakilan serikat pekerja atau pihak lain;
- Mengirim foto atau video yang dapat digunakan sebagai bukti penting dalam memperkuat penanganan kasus;
- Mendapatkan informasi terbaru tentang peristiwa-peristiwa terkini, termasuk perkembangan politik maupun sosial (sebagai contoh, artikel berita dan pengumuman dari Kementerian Pertanian, Badan Perikanan, dan Badan Imigrasi Nasional, atau pihak otoritas lainnya); serta
- Mengungkapkan pandangan mereka pada platform-platform media sosial sebagai bagian dari advokasi bersama.

Selain itu, penggunaan telepon satelit turut memunculkan isu aksesibilitas dan privasi. Saat ini, mayoritas kapal hanya dilengkapi dengan satu telepon satelit yang diletakkan di dek kapten dan hanya dapat digunakan oleh kapten dan supervisor.<sup>65</sup> Namun, penyediaan satu perangkat yang secara khusus dikontrol oleh kapten bukanlah bentuk pemberian akses komunikasi yang memadai agar ABK dapat berkomunikasi dengan keluarga, serikat pekerja, dan pihak lainnya. Bahkan jika kapten memperbolehkan ABK untuk menggunakan telepon satelit, seluruh anggota kru kapal harus berbagi telepon satelit dan tidak akan dapat melakukan panggilan suara maupun berkirim pesan secara rahasia. Hal ini akan mempersulit ABK dalam menghubungi perwakilan serikat pekerja atau pihak pemberi bantuan lainnya. ABK memerlukan fasilitas komunikasi yang tersedia bagi seluruh awak kapal dan dapat digunakan tanpa adanya pengawasan oleh kapten—agar mereka dapat melaporkan pelanggaran hak kepada pihak-pihak yang berada di darat, termasuk serikat pekerja. Oleh sebab itu, agar bersifat aksesibel, setiap ABK harus memiliki satelit telepon. Tidak cukup hanya memiliki satu atau beberapa satelit telepon yang digunakan secara bersama-sama.

Seperti yang telah dijelaskan pada Briefing Paper No. 2, menyediakan Wi-Fi pada kapal-kapal penangkap ikan laut lepas adalah pilihan yang lebih terjangkau daripada menyediakan telepon satelit. Hal ini karena biaya pembelian telepon satelit untuk masing-masing ABK terbilang tinggi (tidak seperti Wi-Fi, yang dapat diakses oleh ABK melalui ponsel masing-masing), serta biaya panggilan yang bervariasi dan dibebankan atas setiap menit panggilan menggunakan telepon satelit (tidak seperti panggilan melalui Wi-Fi yang tidak menimbulkan biaya tambahan). Dengan adanya Wi-Fi, ABK dapat menggunakan perangkat-perangkat elektronik pribadi mereka untuk menghubungi serikat pekerja, keluarga, dan teman secara langsung dan aman—dengan biaya yang lebih terjangkau bagi perusahaan.



## C. K188 harus dibaca dalam konteks kebebasan berserikat di laut

Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (K188), yang disahkan pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-96 pada 2007 dan berlaku pada 2017, telah diratifikasi oleh 21 negara.<sup>66</sup>

Pada 2019, Taiwan telah berkomitmen untuk mengimplementasikan K188 di tingkat nasional.<sup>67</sup> Berlaku untuk seluruh jenis penangkapan ikan, Konvensi ini bertujuan untuk “memastikan bahwa seluruh nelayan memiliki kondisi kerja yang layak di atas kapal berkaitan dengan persyaratan minimal untuk pekerjaan di kapal; ketentuan layanan; akomodasi dan makanan; kesehatan dan keselamatan kerja; perawatan medis dan jaminan sosial.”<sup>68</sup> Selaras dengan tujuan tersebut, K188 secara eksplisit mewajibkan penyediaan akses komunikasi yang memadai bagi ABK di laut. Pasal 71 dalam K188 berbunyi, “Semua awak di kapal harus diberi akses yang memadai terhadap fasilitas komunikasi, hingga ke tingkat yang dapat dipraktikkan, dengan biaya yang wajar dan tidak melebihi biaya penuh ke pemilik kapal penangkap ikan.”

Ketetapan dalam K188 yang mewajibkan penyediaan “akses yang memadai terhadap fasilitas komunikasi, hingga ke tingkat yang dapat dipraktikkan,” bagi ABK harus dibaca dalam konteks kebebasan berserikat—untuk memahami mengapa serikat harus mendapatkan akses terhadap kapal-kapal penangkap ikan, termasuk yang beroperasi di laut lepas. Teks K188 itu sendiri telah menjelaskan bahwa objek dan tujuan Konvensi tersebut adalah memastikan pemenuhan hak-hak fundamental ketenagakerjaan bagi ABK. Selain itu, pada bagian Pembukaan dalam Konvensi, K188 turut mempertimbangkan Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip Fundamental dan Hak-hak di Tempat Kerja (1998); hak-hak fundamental lain yang dimuat dalam K87 dan K98; serta hak-hak fundamental ketenagakerjaan lainnya. Ini merupakan bentuk pengakuan bahwa penghargaan atas hak-hak ABK untuk berserikat dan melakukan perundingan bersama merupakan aspek kunci untuk mewujudkan berbagai hak yang dimuat dalam K188. ABK harus memiliki hak untuk bergabung dalam serikat agar dapat mengakses dan memperjuangkan standar-standar kerja dan hidup yang layak di atas kapal sebagaimana telah ditetapkan dalam K188. Oleh karena itu, kebebasan berserikat merupakan prinsip dasar untuk mewujudkan hak-hak yang tertuang dalam K188.



Dengan berbagai perkembangan teknologi yang ada sekarang, Wi-Fi adalah alternatif yang paling praktis dan terjangkau untuk menyediakan akses komunikasi yang memadai bagi ABK yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan laut lepas. Jika mengamati proses-proses persiapan yang berujung pada pengesahan K188, kita dapat menyimpulkan bahwa para penyusun K188 memilih istilah yang<sup>69</sup> lebih umum, yakni “fasilitas-fasilitas komunikasi” dan klausa “hingga ke tingkat yang dapat dipraktikkan” karena pada 2005, saat negosiasi tersebut dilangsungkan, telepon satelit adalah satu-satunya pilihan yang tersedia untuk melakukan komunikasi di tengah laut dan relatif mahal.<sup>69</sup> Namun, dua dekade kemudian, perkembangan teknologi yang pesat menjadikan Wi-Fi satelit sebagai alternatif yang lebih menjanjikan dan terjangkau untuk kapal-kapal penangkap ikan laut lepas dibandingkan telepon satelit, sebagaimana dijelaskan di atas. Berdasarkan sebuah laporan resmi tahun 2017 yang disampaikan oleh Nautilus International, sebuah serikat pekerja internasional,

*...secara fundamental, sudah tidak ada lagi kendala-kendala teknologi atau keuangan yang menghambat konektivitas di laut. Berbagai perkembangan yang memungkinkan adanya “ikatan ekonomi” di darat telah mendorong para operator satelit untuk memperbaiki kemampuan dan fleksibilitas layanan yang mereka tawarkan kepada perusahaan kemaritiman sehingga biaya penyediaan konektivitas dasar di kapal turun secara drastis hingga mencapai 0,3% dari total biaya operasional kapal. Dan biaya tersebut juga semakin menurun mencapai 0,2%, dan terus menurun seiring dengan meningkatnya kapasitas teknologi tinggi dan kompetisi yang membuat konektivitas maritim semakin terjangkau.<sup>70</sup>*

Selain itu, pembacaan kritis atas Pasal 71 turut menunjukkan bahwa K188 secara implisit mendukung penyediaan Wi-Fi di atas kapal.<sup>71</sup> Dalam proses penyusunan K188, kemampuan berkomunikasi dengan keluarga di darat merupakan salah satu aspek kunci yang mendorong adanya ketetapan yang mewajibkan penyediaan akses terhadap fasilitas komunikasi yang memadai bagi ABK.<sup>72</sup> Wi-Fi satelit adalah satu-satunya fasilitas komunikasi dua-arah yang tersedia di kapal penangkap ikan yang memungkinkan ABK untuk melakukan komunikasi secara bermakna dan berkesinambungan dengan keluarga mereka melalui aplikasi seperti Whatsapp dan Facebook untuk melakukan panggilan suara dan video, mengirim pesan, membagikan foto dan video, maupun berkirim email.<sup>73</sup>

K188 juga menetapkan bahwa ABK harus mendapatkan akses Wi-Fi di atas kapal secara bebas biaya. Dalam proses penyusunan Pasal 71 pada K188, akses



fasilitas komunikasi bagi ABK merupakan pertimbangan kunci karena biaya atas penggunaan fasilitas komunikasi dianggap sebagai faktor penghambat yang signifikan bagi ABK.<sup>74</sup> Biaya dalam jumlah berapa pun yang dibebankan kepada ABK atas akses Wi-Fi akan menghambat mereka dalam menikmati hak dasar tersebut karena ABK hanya memperoleh gaji bulanan sebesar 550 dolar AS—atau hanya setara dua-per-tiga dari upah minimum yang dijamin oleh Labor Standards Act Taiwan.<sup>75</sup> Terlebih, banyak ABK migran yang bahkan tidak mendapatkan upah minimum sesuai hukum, dan sebaliknya, upah mereka ditahan atau dipotong; hal ini menciptakan jeratan utang.<sup>76</sup> Oleh sebab itu, ketentuan tentang penyediaan fasilitas komunikasi yang memadai dalam Pasal 71 pada K188 hanya dapat dipenuhi dengan menyediakan Wi-Fi secara bebas biaya kepada ABK.

Terakhir, MLC yang diamandemen pada 2006 menetapkan bahwa Wi-Fi adalah akses komunikasi yang dijamin untuk seluruh pelaut kecuali ABK. Amandemen ini turut menegaskan bahwa “fasilitas-fasilitas komunikasi” yang dimaksud pada K188—konvensi yang setara dengan MLC dan mencakup ABK dalam hukum internasional—adalah Wi-Fi satelit.<sup>77</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Latar Belakang laporan ini, MLC (2006) adalah konvensi yang setara dengan K188 dan berlaku untuk seluruh pelaut kecuali ABK; MLC telah diratifikasi oleh lebih dari 100 negara di dunia. International Labour Organization menegaskan pentingnya melakukan “upaya yang terkoordinir” dalam mengimplementasikan K188 dan MLC (2006) karena “banyak hukum dan peraturan negara anggota yang membahas ketentuan-ketentuan kerja untuk pelaut turut membahas ketentuan-ketentuan kerja untuk ABK,” walaupun secara historis isu-isu tersebut dibahas dalam konvensi-konvensi yang terpisah dalam hukum internasional.<sup>78</sup> ABK perikanan laut lepas bekerja di laut, seperti pelaut pada umumnya, tetapi mereka mendapatkan skema perlindungan yang terbatas. Sebagai contoh, sebagaimana dijelaskan di atas, pelaut dapat bergabung dengan serikat di pelabuhan, sementara ABK perikanan laut lepas tidak. Bagi pelaut, Wi-Fi sekarang telah menjadi standar baru untuk berkomunikasi di laut. Pada 2022, MLC (2006) diamandemen dengan mewajibkan kapal-kapal menjamin “konektivitas sosial” di atas kapal,<sup>79</sup> dilengkapi dengan Pedoman yang menerjemahkan istilah “konektivitas sosial” sebagai penyediaan akses internet pada seluruh kapal.<sup>80</sup> Dengan kata lain, penyediaan akses internet di atas kapal—sebagai dampak dari perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir—dianggap sebagai standar mutlak yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota pada 2022. Penetapan Wi-Fi sebagai standar dalam akses komunikasi bagi pelaut menegaskan bahwa ABK perikanan laut lepas juga seharusnya dapat menikmati standar yang sama.



## IV. PENTINGNYA MEMASTIKAN KEBEBASAN BERSERIKAT UNTUK MEWUJUDKAN SELURUH HAK-HAK FUNDAMENTAL KETENAGAKERJAAN ABK PERIKANAN LAUT LEPAS DI TAIWAN

Menurut ILO, kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama adalah hak-hak dasar yang “menopang” hak-hak ketenagakerjaan lainnya<sup>81</sup> yang “memungkinkan pemajuan demokrasi, penguatan tata kelola pasar kerja, dan ketentuan-ketentuan kerja.”<sup>82</sup> Dengan kata lain, hak-hak tersebut merupakan “prasyarat” untuk mewujudkan hak-hak fundamental ketenagakerjaan lain—misalnya, “kemampuan pekerja dalam mengorganisir diri secara bebas memungkinkan mereka menggunakan kekuatan kolektif untuk mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan yang lebih baik, kesehatan dan keselamatan kerja, dan hak untuk terbebas dari diskriminasi dan kerja paksa,” serta “standar hidup yang memadai bagi seluruh pekerja dan keluarga mereka.”<sup>83</sup>

Dalam konteks industri perikanan laut lepas Taiwan, menyediakan Wi-Fi pada seluruh kapal penangkap ikan laut lepas sesuai dengan prinsip hak ketenagakerjaan adalah prasyarat utama untuk mewujudkan seluruh hak-hak fundamental ketenagakerjaan bagi ABK—termasuk hak terhadap lingkungan kerja yang aman dan sehat serta terbebas dari diskriminasi dan kerja paksa.



## A. Lingkungan kerja yang aman dan sehat: Keberadaan Wi-Fi yang selaras dengan prinsip kebebasan berserikat akan membantu ABK menyelamatkan diri dari kondisi kerja yang berbahaya

Sejak 2022, ILO mengakui bahwa hak terhadap tempat kerja yang aman dan sehat merupakan hak dasar ketenagakerjaan.<sup>84</sup> Hak terhadap lingkungan kerja yang aman dan sehat dilindungi oleh Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155) (K155) dan Konvensi tentang Kerangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (No. 187) (K187).<sup>85</sup> Dalam K155, Pasal 13 menetapkan bahwa pekerja berhak untuk menolak pekerjaan yang berbahaya, sementara Pasal 19 menyatakan bahwa pemberi kerja dilarang memaksa pekerja kembali ke tempat kerja sebelum keadaan sudah aman.<sup>86</sup>

Tempat kerja yang terisolir di tengah lautan lepas membuat akses Wi-Fi yang selaras dengan prinsip kebebasan berserikat menjadi sangat penting bagi ABK—agar mereka dapat menolak bekerja dalam kondisi-kondisi yang membahayakan nyawa. Wi-Fi akan membantu ABK memastikan bahwa tempat kerja mereka aman dan sehat—yakni dengan memungkinkan ABK melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi (seperti pemukulan atau ancaman verbal) atau kondisi-kondisi kerja yang berbahaya (misalnya, ketiadaan perlengkapan keamanan atau penolakan untuk memberikan pengobatan medis dengan tanggap) kepada perwakilan serikat, pejabat pemerintahan, atau pihak lain di darat yang dapat memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah mereka secara *real-time*. Oleh sebab itu, menyediakan akses Wi-Fi di atas kapal adalah wujud usaha untuk memastikan seluruh kapal penangkap ikan laut lepas berbendera Taiwan memiliki lingkungan kerja yang aman dan sehat.

## Kerja paksa: Akses Wi-Fi yang sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat mengeluarkan ABK dari situasi yang terisolir dan memastikan pertanggungjawaban pemberi kerja atas indikator-indikator kerja paksa ILO

Usaha apa pun yang dilakukan untuk memerangi kerja paksa harus turut menghormati hak kebebasan berserikat.<sup>87</sup> Pengalaman ILO menunjukkan bahwa “pemerintah tidak dapat menghapuskan kerja paksa tanpa, pertama-tama, memastikan bahwa seluruh pekerja dapat menikmati hak untuk



bergabung dan membentuk serikat serta terlibat kegiatan-kegiatan bersama seperti mogok kerja.”<sup>88</sup> Tana adanya perwakilan kolektif, pekerja akan luput dari diskusi karena ketimpangan relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja.<sup>89</sup> Sebaliknya, serikat pekerja membantu pekerja untuk terbebas dari kerja paksa dengan cara menyeimbangkan relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja, serta membantu mendorong situasi kerja yang terbebas dari eksploitasi.<sup>90</sup> Dengan membantu ABK membentuk, bergabung, dan berkomunikasi dengan serikat pekerja selama merasa berlayar di laut, Wi-Fi turut membantu menyeimbangkan relasi kuasa di atas kapal dan mengurangi risiko kerja paksa.

Seperti yang telah dibahas di atas, ABK migran memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kerja paksa akibat skema visa yang mengikat dan sistem ketenagakerjaan dua-tingkat di Taiwan yang diskriminatif terhadap mereka. Oleh sebab itu, kebutuhan ABK migran terhadap akses Wi-Fi lebih tinggi untuk mewujudkan hak berserikat dan melakukan perundingan bersama di laut. Akses Wi-Fi akan mengeluarkan ABK dari situasi terisolir dan rentan, serta membantu ABK untuk mempertahankan hak-hak fundamental ketenagakerjaan mereka. Dengan adanya akses Wi-Fi, ABK dapat menghubungi keluarga, perwakilan serikat, organisasi keagamaan, lembaga pemerintahan, dan pihak lain untuk melaporkan pelanggaran hak ketenagakerjaan, termasuk indikator-indikator kerja paksa. Kemampuan melapor ke serikat pekerja sangat penting karena seringkali petugas pemerintahan Taiwan tidak berhasil mengatasi laporan pelanggaran secara efektif,<sup>91</sup> sebagian disebabkan oleh keterbatasan wewenang dan kapasitas Badan Perikanan Taiwan dibandingkan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan.<sup>92</sup>





### C. Non-diskriminasi: Penyediaan akses Wi-Fi yang sejalan dengan prinsip kebebasan berserikat membantu ABK melindungi hak terhadap kebebasan berserikat

Keterbatasan yang dihadapi ABK perikanan laut lepas dalam mengakses serikat pekerja merupakan bentuk diskriminasi hak ketenagakerjaan. Karena sebagian besar pekerja yang menyokong industri perikanan laut lepas Taiwan adalah pekerja migran, keterbatasan akses serikat di atas kapal-kapal penangkap ikan laut lepas juga turut berdampak pada pekerja migran dan merupakan bentuk diskriminasi, yang melanggar hukum internasional. Salah satu prinsip fundamental ketenagakerjaan ILO adalah penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.<sup>93</sup> Larangan diskriminasi juga ditetapkan dalam Konvensi ILO tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111) (K111). Sebuah praktik yang menimbulkan dampak atau efek negatif yang besar terhadap pekerja migran—walaupun tidak disengaja mendiskriminasi—dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi dalam hukum internasional.<sup>94</sup> Beberapa contoh kasus yang dianggap diskriminatif terhadap pekerja migran meliputi dampak negatif COVID-19 yang tidak proporsional terhadap pekerja migran<sup>95</sup> dan dampak negatif perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap pekerja migran.<sup>96</sup>

Oleh sebab itu, penting untuk melindungi pekerja migran dari dampak langsung maupun tidak langsung dari diskriminasi.<sup>97</sup> Ketika terjadi diskriminasi sistemik, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah lain, termasuk memberikan insentif kepada aktor-aktor swasta serta menyalurkan sumber daya lebih untuk melindungi populasi yang secara historis mengalami marginalisasi.<sup>98</sup> Dalam konteks ini, Wi-Fi mengatasi masalah keterbatasan akses ABK terhadap serikat pekerja—masalah yang berdampak besar terhadap kesejahteraan ABK yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan laut lepas Taiwan. Akses Wi-Fi memungkinkan ABK melaporkan keluhan dan menyelesaikan pelanggaran hak. Situasi ini membantu menyeimbangkan relasi kuasa di atas kapal dan memberdayakan ABK sehingga mereka mampu memperjuangkan hak-hak fundamental ketenagakerjaan untuk diri mereka sendiri.



# MITRA-MITRA INTI DALAM KAMPANYE INI

## Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI)



FOSPI, atau Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia, adalah sebuah asosiasi kedaerahan nelayan Indonesia yang berbasis di Donggang, Taiwan. Dengan lebih dari 2.000 anggota, FOSPI bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan migran sejak didirikan pada 2006. FOSPI berusaha memajukan hak-hak nelayan migran dan mengorganisir berbagai komunitas nelayan migran di Taiwan.

## Global Labor Justice – International Labor Rights Forum (GLJ-ILRF)



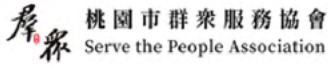
GLJ-ILRF adalah organisasi HAM yang berusaha memperkuat kapasitas strategis dalam kolaborasi lintas-sektoral terkait rantai nilai global dan koridor migrasi tenaga kerja. GLJ-ILRF mendorong pertanggungjawaban korporasi-korporasi global terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam rantai pasokan mereka; mendorong pengesahan peraturan dan undang-undang untuk mewujudkan kerja layak dan migrasi yang adil; serta memperkuat kebebasan berserikat, perundingan bersama dalam bentuk-bentuk baru, dan organisasi pekerja.

## Humanity Research Consultancy (HRC)



HRC adalah usaha sosial (social enterprise) yang mendapatkan penghargaan atas berbagai layanan yang diberikan, yakni investigasi terhadap rantai pasokan, pelatihan, serta layanan konsultasi untuk pemerintah, NGO, dan korporasi. Dengan mengumpulkan pengetahuan lokal berbasis bukti, HRC meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan untuk mengakhiri kerja paksa, perbudakan modern, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara global. Dengan menghubungkan klien dengan ahli di lebih dari 50 negara, HRC berfokus pada penyampaian pengetahuan lokal yang sensitif secara budaya, investigasi lapangan yang komprehensif, dan penelitian.

## Serve the People Association (SPA)



SPA adalah organisasi non-pemerintahan independen yang didirikan pada 2008 dan berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang layak bagi pekerja migran Filipina, Indonesia, Vietnam, dan lainnya di Taiwan. SPA menyelamatkan pekerja migran dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran hak lainnya dan menyediakan ruang aman sementara pada dua lokasi, serta konsultasi hukum, bantuan medis, pemindahan darurat, bantuan mengklaim gaji dan kompensasi, serta layanan lainnya.

## Stella Maris Kaohsiung



Stella Maris Kaohsiung merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berpusat di Pelabuhan Kaohsiung, Taiwan. Organisasi ini mendukung perlindungan pekerja migran, nelayan, dan pengungsi. Stella Maris Kaohsiung menyediakan rumah aman untuk pekerja migran yang mengalami sengketa ketenagakerjaan, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan tengah memproses kasus-kasus di pengadilan. Mereka juga melakukan kunjungan rutin ke kapal-kapal penangkap ikan dan mendorong perubahan undang-undang untuk memperkuat mekanisme perlindungan pekerja migran di sektor perikanan.

## Taiwan Association for Human Rights (TAHR)



TAHR adalah asosiasi hak asasi manusia tertua di Taiwan yang bertujuan untuk menguatkan standar-standar hak asasi manusia dan mekanisme perlindungan. TAHR mengatasi isu-isu nasional dan global melalui kerja sama dengan berbagai organisasi HAM internasional. Organisasi ini fokus mengadvokasi berbagai macam isu, salah satunya adalah hak-hak pekerja migran dan pengungsi.



## REFERENSI

- Baca Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya (1998) (amandemen 2022), <https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm#:~:text=The%20ILO%20Declaration%20on%20Fundamental,our%20social%20and%20economic%20lives>, baca juga Konvensi ILO tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, 2007 (No. 188) (K188), [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:C188](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188).
2. Sally Yozell and Amanda Shaver, *Shining a Light: The Need for Transparency Across Distant Water Fishing* (2019), Stimson Center, hal. 6, <https://www.stimson.org/wp-content/files/file-attachments/Stimson%20Distant%20Water%20Fishing%20Report.pdf>.
  3. Oceana, “Ask Dr. Pauly: What are distant-water fishing fleets, and how do they affect overfishing?” (Oct. 21, 2013), <https://usa.oceana.org/blog/ask-dr-pauly-what-are-distant-water-fishing-fleets-and-how-do-they-affect-overfishing/>.
  4. David Tickler, et al., *Far from home: Distance patterns of global fishing fleets*, *Science Advances*, Vol 4., No. 8 (2018): pp. 1–6, DOI: [10.1126/sciadv.aar327](https://doi.org/10.1126/sciadv.aar327).
  5. Yannick Rousseau, et al., *Evolution of global marine fishing fleets and the response of fished resources*, *PNAS*, Vol. 116, No. 25: pp. 12238–12243, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1820344116>.
  6. Tickler, et al, “Far from home.”
  7. *Id.* at 14.
  8. Mina Chiang and Kimberly Rogovin, *Labor Abuse in Taiwan’s Seafood Industry & Local Advocacy for Reform* (2020), GLJ-ILRF, p. 8, <https://laborrights.org/sites/default/files/publications/Labor-Abuse-in-Taiwan-Seafood-Industry-Local-Advocacy-for-Reform.pdf>.
  9. *Id.* The actual number of Taiwanese FOC vessels is likely at least triple the official figure.
  10. Food and Agriculture Organization (FAO), *The State of the World Fisheries and Aquaculture 2020: Sustainability in Action* (2020), p. 13, <https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229en>.
  11. Executive Yuan, “Action Plan for Fisheries and Human Rights” (May 6, 2022),

<https://english.ey.gov.tw/News3/9E5540D592A5FECD/89bbc610-49c2-4080-85f9-6d2cb98bee96#:~:text=Enforce%20proper%20working%20conditions%3A%20Raise,vessels%20to%20verify%20man%2Dhours.&text=Improve%20living%20conditions%20and%20social,can%20continuously%20spend%20at%20sea.>

12. Baca, e.g., Greenpeace, *Made in Taiwan: Government Failure and Illegal, Abusive and Criminal Fisheries* (2016),

<https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2016/04/1f3e47c1-taiwan-tuna-rpt-2016.pdf>; Greenpeace, *Misery at sea: human suffering in Taiwan's distant water fishing fleets* (2018),

<https://www.greenpeace.org/aotearoa/publication/misery-at-sea/>; Greenpeace, *Seabound: The Journey to Modern Slavery on the High Seas*,

<https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2019/12/b68e7b93-greenpeace-seabound-book-c.pdf>; Greenpeace,

*Fake My Catch: The Unreliable Traceability in our Tuna Cans* (2022),

[https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2022/08/FakeMyCatch\\_EN.pdf](https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2022/08/FakeMyCatch_EN.pdf);

Environmental Justice Foundation (EJF), *Human trafficking in Taiwan's fisheries sector* (2018),

<https://ejfoundation.org/resources/downloads/EJF-Briefing-Taiwan-2018.pdf>;

EJF, "Widespread Abuse and Illegal Fishing as Taiwan's Fleet Remains Out of Control" (July 22, 2020); Chiang and Rogovin, *Labor Abuse in Taiwan's Seafood Industry*;

GLJ-ILRF and Greenpeace, Comments Concerning the Ranking of Taiwan by the United States Department of State in the 2022 Trafficking in Persons Report (2022),

[https://laborrights.org/sites/default/files/publications/SWG%20Taiwan%20TIP%20Report%202022%20Submission\\_Final\\_April-7-2022.pdf](https://laborrights.org/sites/default/files/publications/SWG%20Taiwan%20TIP%20Report%202022%20Submission_Final_April-7-2022.pdf);

GLJ-ILRF and Greenpeace, Comments Concerning the Ranking of Taiwan by the United States Department of State in the 2023 Trafficking in Persons Report (2023),

[https://laborrights.org/sites/default/files/publications/2023%20SWG%20TIP%20Report%20Submission%20on%20Taiwan\\_0.pdf](https://laborrights.org/sites/default/files/publications/2023%20SWG%20TIP%20Report%20Submission%20on%20Taiwan_0.pdf).

13. International Labour Organization (ILO), *ILO Indicators of Forced Labor* (2012), [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_203832.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf).

14. Baca Greenpeace, *Greenpeace Briefing on Taiwan for the US Department of Labor 2020 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor* (2020),

[https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2020/05/Greenpeace-Briefing-to-US-DoL\\_May-5-2020\\_FINAL.pdf](https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2020/05/Greenpeace-Briefing-to-US-DoL_May-5-2020_FINAL.pdf); Baca also Greenpeace, *Made in*



Taiwan; Greenpeace, *Misery at sea*. Even more cases can be found in Greenpeace's 2019 report *Seabound*. They include the cases of Fu Yuan Yu No. 54, 55, 56, 62; Han Rong No. 353; Lu Rong Yuan Yu No. 30; Shin Jaan Shin; and Zhon Da No. 2.

15. European Commission, "Fighting illegal fishing: Commission warns Taiwan and Comoros with yellow cards and welcomes reforms in Ghana and Papua New Guinea" (Oct. 1, 2015),

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_15\\_5736](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5736).

16. European Commission, *Questions and Answers - Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing in general and in Taiwan*,

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA\\_19\\_3398](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_3398).

17. *Baca* U.S. Customs and Border Protection (CBP), "CBP Issues Detention Order on Tuna Harvested by Forced Labor Aboard the Tunago No. 61" (Feb. 6, 2019), <https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-issues-detention-order-tuna-harvested-forced-labor-aboard-tunago>;

CBP, "CBP Revokes Withhold Release Order on Imports of Tuna Harvested by the Tunago No. 61 Vessel" (Apr. 1, 2020), <https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-release-order-imports-tuna-harvested-tunago-no>;

CBP, "CBP Issues Detention Order on Seafood Harvested with Forced Labor" (May 11, 2020), <https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-issues-detention-order-seafood-harvested-forced-labor>;

CBP, "CBP Issues Detention Order on Seafood Harvested with Forced Labor" (Aug. 18, 2020), <https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-issues-detention-order-seafood-harvested-forced-labor-0>;

CBP, "CBP Issues Withhold Release Order on Seafood Harvested with Forced Labor by Lien Yi Hsing No. 12" (Dec. 31, 2020), <https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-issues-withhold-release-order-seafood-harvested-forced-labor>.

18. Greenpeace, "Taiwan-caught fish once again on Department of Labor's (DOL) List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor" (Sept. 29, 2022),

<https://www.greenpeace.org/usa/news/taiwan-caught-fish-once-again-on-department-of-labors-dol-list-of-goods-produced-by-child-labor-or-forced-labor/>.

19. Lima negara prioritas tersebut meliputi Ekuador, Panama, Senegal, Taiwan, dan Vietnam. Negara prioritas dalam hal ini diartikan sebagai negara yang kapal-kapalnya "terlibat secara aktif, mencari keuntungan dari, atau terlibat dalam penangkapan ikan IUU" dan, pada saat yang sama, "bersedia, tetapi memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengawasi atau mengambil tindakan terhadap kapal-kapal mereka." Penting untuk dicatat bahwa negara-negara prioritas belum tentu merupakan negara-negara yang paling banyak

melakukan pelanggaran. U.S. Interagency Working Group on IUU Fishing, National Five-Year Strategy for Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (2022-2026), NOAA, hal. 5, necessarily the worst IUU fishing offenders. U.S. Interagency Working Group on IUU Fishing, National Five-Year Strategy for Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (2022-2026), NOAA, p. 5, [https://media.fisheries.noaa.gov/2022-10/2022\\_NationalStrategyReport\\_USIWGonIUUfishing.pdf](https://media.fisheries.noaa.gov/2022-10/2022_NationalStrategyReport_USIWGonIUUfishing.pdf).

20. The White House, *Memorandum on Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Associated Labor Abuses* (2022), <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/06/27/memorandum-on-combating-illegal-unreported-and-unregulated-fishing-and-associated-labor-abuses/>.

21. Enam negara dan badan lain yang memiliki kapal-kapal yang terlibat dalam praktik IUU mencakup Angola, Grenada, Meksiko, Tiongkok, Gambia, dan Vanuatu. NOAA Fisheries, 2023 Report to Congress Improving International Fisheries Management (2023), <https://www.fisheries.noaa.gov/s3/2023-08/2023RTC-ImprovingIFManagement.pdf>.

22. *Id.* Kerja paksa juga ditemukan di Tiongkok.

23. Chiang dan Rogovin, Labor Abuse in Taiwan's Seafood Industry, hal. 5. K188 tidak menetapkan durasi kerja maksimum bagi ABK, tidak seperti MLC, 2006, yang membatasi durasi kerja hingga maksimum 11 bulan. Peter Vandergeest, Melissa Marschke, and Mallory MacDonnell, Seafarers in fishing: A year into the COVID-19 pandemic (2021), Marine Policy, Vol. 134, [10.1016/j.marpol.2021.104796](https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104796).

24. Beberapa indikator tersebut meliputi kerentanan, penipuan, pembatasan gerak, kekerasan fisik, intimidasi dan ancaman, penahanan dokumen identitas, penahanan gaji, jeratan utang, kondisi kerja dan tinggal yang eksploitatif, dan kerja lembur di luar batas.

25. Greenpeace, *Greenpeace Briefing on Taiwan*.

26. Durasi maksimal untuk kapal laut lepas penangkap cumi dan ikan adalah 10 bulan berturut-turut, sementara untuk kapal penangkap sauri 8 bulan berturut-turut. Baca Pasal 5-1, Regulations for Tuna Longline Fishing Vessels Proceeding to the Atlantic Ocean for Fishing Operation, <https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0050057>; Pasal 4-1, Regulations for Fishing Vessels Conducting Squid Jigging Fishery, <https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0050063>. Pasal 4-1, Regulations for Fishing Vessels Conducting Sauri Fishery in North Pacific Ocean, <https://law.moa.gov.tw/glrnewsout/EngLawContent.aspx?lan=E&id=446>.



27. Informasi diperoleh dari konsultan GLJ-IRF (11 Mei 2023).
28. Chiang dan Rogovin, *Labor Abuse in Taiwan's Seafood Industry*, p. 10.
29. Vandergeest, et al., *Seafarers in fishing*.
30. Information provided by GLJ-ILRF consultant (May 11, 2023).
31. Nathan Lillie, *Union Networks and Global Unionism in Maritime Shipping*, *Relations Industrielles / Industrial Relations*, Vol. 60, No. 1 (2005), pp. 88-111, <https://www.jstor.org/stable/23077637>.
32. *Id.* Baca juga Sanna Saksela-Bergholm, *The inspectorate network of the International Transport Workers Federation: A comparison of a transnational union enforcement action in Finland, Poland and Spain (2020)*, SPLIN, <https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/research-groups/splin/splin-itf-synthesis-report-nov-2020-edited-final-3.pdf>.
33. Jan Mirkowski, "The World's Most Dangerous Countries for Workers" (Oct. 20, 2021), *Arinite Health and Safety*, <https://www.arinite.co.uk/the-worlds-most-dangerous-countries-for-workers>.
34. Sam Willis and Eric Holliday, *Triggering Death: Quantifying the True Human Cost of Global Fishing (2022)*, FISH Safety Foundation, p. 21, <https://go.fishsafety.org/downloads/White%20Paper%20-%20Triggering%20Death%20-%20November%202022.pdf>.
35. *Id.*
36. Pew, "More Than 100,000 Fishing-Related Deaths Occur Each Year, Study Finds" (updated Dec. 14, 2022), <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2022/11/more-than-100000-fishing-related-deaths-occur-each-year-study-finds>.
37. Baca Article 29(d) of C188 and Standard A4.1 of the MLC, 2006, as amended.
38. Kuo-Wei Yen and Li-Chuan Liuhang, *A review of migrant labor rights protection in distant water fishing in Taiwan: From laissez-faire to regulation and challenges behind*, *Marine Policy*, Vol. 134 (2021), p. 4, <https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1991&context=srhreports>.
39. Salah satu contohnya adalah kasus Supriyanti. *Id.* 5.
40. Yen and Liuhang, *A review of migrant labor rights protection in distant water fishing in Taiwan*, p. 2.

41. Huan-Sheng Tseng, Hsin-Hua Tsai, and Po-Hsing Tseng, *The Labor Rights Protection of Migrant Fishing Workers in Taiwan: Case Study of Nan-Fang-Ao Fishing Harbor*, *Fishes*, Vol. 8, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.3390/fishes8020073>.
42. MOL, Labor Standards Act (2020), Laws and Regulations Database of the Republic of China (Taiwan), <https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0030001>; Chiang and Rogovin, *Labor Abuse in Taiwan's Seafood Industry*, pp. 12–13.
43. Chiang and Rogovin, *Labor Abuse in Taiwan's Seafood Industry*, p. 10; GLJ-ILRF and Greenpeace, *Comments Concerning the Ranking of Taiwan by the United States Department of State in the 2022 Trafficking in Persons Report*, p. 14.
44. GLJ-ILRF and Greenpeace, *Comments Concerning the Ranking of Taiwan by the United States Department of State in the 2023 Trafficking in Persons Report*, p. 12.
45. *Id.*
46. *Id.*, p. 5, 15.
47. *Baca* Greenpeace, *Greenpeace Briefing on Taiwan*.
48. Felipe González Morales, *Right to freedom of association of migrants and their defenders*, UN General Assembly, Human Rights Council, A/HRC/44/42, May 13, 2020, <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/report-right-freedom-association-migrants>.
49. *Baca* ILO, *Freedom of association: Compilation of decisions of the Committee of Freedom of Association, Sixth edition* (2018), para. 1589, p. 297, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---normes/documents/publication/wcms\\_632659.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_632659.pdf).
50. *Cedar Point Nursery and Fowler Packing Company, Inc. v. Victoria Hasid*, in her official capacity as Chair of the Agricultural Labor Relations Board, et al. Brief amicus curiae of International Lawyers Assisting Workers Network (ILAW), International Commission for Labor Rights (ICLR), Global Labor Justice - International Labor Rights Forum (GLJ-ILRF), and Cornell Labor Law Clinic. 8 Feb 2021. SCOTUSblog, [https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20-107/168874/20210212115332960\\_20-107%20Cedar%20Point%20Nursey%20v%20Victoria%20Hassid%20Amicus%20Brief.pdf](https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20-107/168874/20210212115332960_20-107%20Cedar%20Point%20Nursey%20v%20Victoria%20Hassid%20Amicus%20Brief.pdf). PDF download.
51. *Baca* ILO, *Freedom of association: Compilation of decisions*, para. 1590.
52. *Baca id.*, para. 1591.



53. *Baca id.*, para. 1594.

54. *Baca id.*, para. 1600.

55. *Baca kasus-kasus catatan kaki infra 58.*

56. *Baca, e.g.*, International Labour Conference, *Decent work for domestic workers: Report of the Committee on Domestic Workers* (2010),

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_104700.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_104700.pdf);

International Labour Conference, *Report of the Committee on Domestic Workers: first discussion in plenary* (2010),

[https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO\\_INST:41ILO\\_V2/1246666650002676](https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1246666650002676).

57. *Baca ILO, Freedom of association: Compilation of decisions*, para. 1609.

58. *Baca International Labour Office Governing Body, Reports of the Committee on Freedom of Association: 354th Report of the Committee on Freedom of Association* (2009), GB.305/5, 305th Session, Kasus No. 2626, "Complaint against the Government of Chile presented by the Confederation of Copper Workers (CTC) and the Single Central Organization of Workers (CUT)," para. 360, hal. 88–89, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_108490.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_108490.pdf) ("Walaupun memperhatikan karakteristik khusus industri pertambangan, yang dapat mempersulit proses pemberian akses bagi pekerja dari luar perusahaan, Komite menjelaskan bahwa "pemerintah harus menjamin bahwa perwakilan serikat pekerja memiliki akses terhadap tempat kerja, dengan menghormati hak properti dan manajemen, sehingga serikat pekerja dapat berkomunikasi dengan pekerja agar dapat memberitahukan kepada mereka tentang manfaat berserikat'...Dalam situasi tersebut, Komite mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat perjanjian...agar perwakilan CTC dapat memperoleh akses terhadap tempat kerja untuk menjalankan kegiatan serikat mereka, tanpa mengganggu fungsi kerja perusahaan.");

International Labour Office Governing Body, *Reports of the Committee on Freedom of Association: 374th Report of the Committee on Freedom of Association* (2015), GB.323/INS/9, 323rd Session, Case No. 2946, "Complaint against the Government of Colombia presented by – the Single Confederation of Workers of Colombia (CUT) and – the Workers' Trade Union Confederation of the Oil Industry (USO)," para. 242, hal. 62–63,

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_357167.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_357167.pdf) ("...Komite

menyebutkan dalam berbagai kesempatan bahwa...akses terhadap tempat kerja, selama atau di luar jam kerja, harus diberikan kepada organisasi pekerja

tanpa mengganggu jalannya fungsi administrasi atau lembaga publik yang terlibat...Komite...memohon agar pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa, dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan yang obyektif dan tidak mengganggu fungsi perusahaan yang efisien, seluruh perusahaan di bidang perminyakan mengizinkan petugas-petugas serikat pekerja eksternal untuk memasuki wilayah-wilayah pekerja, baik untuk menemui anggota mereka maupun menyebarkan informasi kepada pekerja non-serikat terkait manfaat bergabung dengan serikat pekerja.”); ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), General Survey concerning the right of association and rural workers’ organizations instruments (2015), International Labour Conference, ILC.104/III/1B , 104th Session, para. 153, hal. 49, [https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661\(2015-104-1B\).pdf](https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2015-104-1B).pdf) (“Komite mengakui bahwa perkebunan...adalah properti pribadi tempat para pekerja tidak hanya bekerja tetapi juga tinggal, dan hanya dengan mengakses wilayah-wilayah tersebut perwakilan serikat pekerja dapat melakukan kegiatan-kegiatan serikat secara normal. Oleh sebab itu, perwakilan serikat pekerja harus mendapatkan izin dengan mudah untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan serikat sesuai ketentuan hukum, asalkan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan selama jam kerja dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga properti perusahaan.”).

59. Special Rapporteur on the human rights of migrants, *Right to freedom of association of migrants and their defenders* (2020), A/HRC/44/42, Human Rights Council, 44th Session, <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4442-right-freedom-association-migrants-and-their-defenders-report>.

60. Special Rapporteur on the rights to peaceful assembly and of association, *Rights to freedom of peaceful assembly and of association* (2019), A/HRC/41/41, Human Rights Council, 41st Session, <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4141-rights-freedom-peaceful-assembly-and-association-report-special>.

61. Human Rights Council, *The promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests* (2020), A/HRC/44/L.11, 44th Session, <https://digitallibrary.un.org/record/3877214?ln=en>.

62. *Baca Article 29, ILO Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188).*

63. *Baca GLJ-ILRF, Briefing Paper No. 2: Wi-Fi: Available at Sea – but Not for Fishers.*



64. Fungsi-fungsi yang dijelaskan tersebut berdasarkan paparan dari Thuraya MarineStar, walaupun telepon satelit lain mungkin memiliki fungsi tambahan. Baca Thuraya, Thuraya MarineStar, <https://www.thuraya.com/en/products-list/marine/thuraya-marinestar#request-a-quote>.
65. Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam K188 (Pasal 29) dan MLC (Standar A4.1) bahwa seluruh kapal penangkap ikan laut lepas untuk memiliki telepon satelit agar dapat melakukan komunikasi radio atau satelit dengan individu atau lembaga di darat yang dapat memberikan bantuan medis.
66. Baca ILO, *Ratifications of C188 - Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188), [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::no:11300:p11300\\_instrument\\_id:312333](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::no:11300:p11300_instrument_id:312333).
67. Chiang and Rogovin, *Labor Abuse in Taiwan's Seafood Industry*.
68. ILO Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) (C188), Preamble.
69. Ahli ketenagakerjaan dari Argentina mengangkat isu ini pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional sesi ke-93 pada 2005. International Labour Office, Report V(2A): Work in the fishing sector (2005), International Labour Conference, 93rd Session, <https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-v-2a.pdf>.  
Baca juga "First Internet Ready Satellite Launched" (29 Sep 2003), Space Daily, <https://www.spacedaily.com/news/satellite-biz-03zza.html>.
70. Nautilus International, *An investigation into connectivity at sea* (2017), p. 24, <https://www.nautilusint.org/en/news-insight/resources/nautilus-reports/connectivity-at-sea-whitepaper/>.
71. International Labour Office, *Report V(1): Conditions of work in the fishing sector: A comprehensive standard (a Convention supplemented by a Recommendation) on work in the fishing sector* (2004), International Labour Conference, 92nd Session, [https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO\\_INST:41ILO\\_V2/1246451080002676](https://labordoc.ilo.org/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1246451080002676).
72. Sebagai contoh, perwakilan dari India berujar, "Sistem komunikasi di atas kapal harus ditingkatkan, untuk memastikan kesinambungan komunikasi dari kapal ke basis di darat dan sebaliknya, sehingga ABK yang menghabiskan durasi yang panjang di laut dapat memperoleh informasi tentang keadaan keluarga mereka." International Labour Office, Report V(2A): Work in the fishing sector (2005), International Labour Conference, 93rd Session, <https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-v-2a.pdf>.

73. Baca GLJ-ILRF, *Briefing Paper No. 2: Wi-Fi: Available at Sea – but Not for Fishers*.

74. Baca International Labour Office, *Report V(2A): Work in the fishing sector* (2005), p. 115.

75. Baca Fisheries Agency, Ministry of Agriculture, “The wage of migrant fisher of Taiwan's distant water fisheries fishing vessel will be paid directly, and the monthly minimum wage raised to US\$ 550” (Nov. 3, 2022),

<https://en.fa.gov.tw/view.php?>

[theme=Press\\_Release&subtheme=&id=79#:~:text=to%20US%24%20550-,The%20wage%20of%20migrant%20fisher%20of%20Taiwan's%20distant%20water%20fisheries,wage%20raised%20to%20US%24%20550&text=In%202022%20May%20to%20Taiwan,Employment%20of%20Foreign%20Crew%20Members%E2%80%9D](https://en.fa.gov.tw/view.php?theme=Press_Release&subtheme=&id=79#:~:text=to%20US%24%20550-,The%20wage%20of%20migrant%20fisher%20of%20Taiwan's%20distant%20water%20fisheries,wage%20raised%20to%20US%24%20550&text=In%202022%20May%20to%20Taiwan,Employment%20of%20Foreign%20Crew%20Members%E2%80%9D);

Baca also Focus Taiwan, “COST OF LIVING/Proposed minimum monthly wage hike to benefit 1.79 million workers: Ministry” (Sept. 8, 2023),

<https://focustaiwan.tw/business/202309080022>.

76. Berdasarkan sebuah laporan yang dipublikasikan oleh EJF, 92% ABK migran yang disurvei melaporkan bahwa mereka mengalami penahanan gaji. EJF,

*Illegal fishing and human rights abuses in the Taiwanese fishing fleet* (2020),

<https://ejfoundation.org/resources/downloads/Taiwan-briefing-IUU-HR-2020-July.pdf>. See also Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2023

Trafficking in Persons Report: Taiwan (2023), U.S. Department of State,

<https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/taiwan/> (“FA

mengesahkan peraturan-peraturan yang...yang menetapkan upah minimum dengan pilihan pembayaran secara langsung...Namun, berbagai NGO telah

menunjukkan bahwa kompensasi minimum yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut lebih rendah daripada upah minimum Taiwan secara

umum, dan kru senior kapal sering melakukan penundaan atau penahanan

pengiriman upah, yang melanggar ketentuan kontrak. Situasi ini membuat

beberapa ABK migran rentan terhadap kekerasan berbasis utang.”).

77. *Id.*

78. International Labour Office, *Matters arising out of the work of the 96th*

*Session of the International Labor Conference: Follow-up to the adoption of the work in fishing Convention and Recommendation and related Conference*

*resolutions* (2007), GB.300/3/1, 300th Session, para. 8, p. 2,

[https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/300/GB.300\\_3\\_1\\_engl.pdf](https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/300/GB.300_3_1_engl.pdf).

79. MLC (2006) diamandemen pada 2022, Standar A3.1 — Akomodasi dan fasilitas-fasilitas rekreasional: “17. Fasilitas, kenyamanan, dan layanan

rekreasional yang layak bagi pelaut, termasuk konektivitas sosial, disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus para pelaut yang harus hidup dan bekerja 33



di atas kapal, harus disediakan di atas kapal untuk digunakan oleh seluruh pelaut, dengan mempertimbangkan Peraturan 4.3 dan ketentuan-ketentuan terkait perlindungan kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan.”

80. MLC, 2006, diamandemen pada 2022, Pedoman B3.1.11 — Fasilitas-fasilitas rekreasi, peraturan tentang berkirim pesan dan kunjungan kapal: “8. Para pemilik kapal harus, sebagaimana layaknya, menyediakan akses internet kepada pelaut di atas kapal, dengan biaya, jika ada, yang terjangkau.”

81. ILO, 8. *Freedom of Association and Collective Bargaining* (last accessed July 18, 2023), <https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/freedom-of-association/lang--en/index.htm>.

82. International Labour Office, *Report I(B): Freedom of association in practice: Lessons learned* (2008), International Labour Conference, 97th Session, [http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms\\_096122.pdf](http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_096122.pdf).

83. The Danish Institute for Business and Human Rights, *Freedom of association and collective bargaining* (last accessed July 18, 2023), <https://biz.sdg.humanrights.dk/salient-issue/freedom-of-association-and-collective-bargaining>.

84. ILO, “A safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work,” <https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/fundamental-principle/lang--en/index.htm#:~:text=At%20its%20110th%20Session%20in,consequential%20amendments%20to%20the%20ILO>.

85. ILO, C155 - Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100\\_INSTRUMENT\\_ID:312300:NO#A9](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO#A9).

86. Baca ILO, C155 - Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:C155](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155).

87. Baca, e.g. Kimberly Rogovin, *Time for a Sea Change: Why union rights for migrant workers are needed to prevent forced labor in the Thai seafood industry* (2020), ILRF, [https://laborrights.org/sites/default/files/publications/ILRF\\_TimeforaSeaChange.pdf](https://laborrights.org/sites/default/files/publications/ILRF_TimeforaSeaChange.pdf); UN Sustainable Development Group, *ILO Supervisory Machinery and Bodies* (last accessed July 18, 2023), <https://unsdg.un.org/2030-agenda/strengthening-international-human-rights/ilo-supervisory-machinery-and-bodies>.

88. Desiree Leclercq, “Three reasons the Biden administration should stop fetishizing forced labor” (May 12, 2023), The Hill, <https://thehill.com/opinion/civil-rights/4000056-three-reasons-the-biden-administration-should-stop-fetishizing-forced-labor/>.
89. *Id.*
90. Rogovin, *Time for a Sea Change*.
91. Beberapa contohnya adalah kasus Fu Tsz Chiun dan Fuh Sheng 11. Baca Greenpeace, Greenpeace Briefing on Taiwan; baca juga Greenpeace, Misery at Sea, hal. 28-36.
92. Baca GLJ-ILRF and Greenpeace, *Comments Concerning the Ranking of Taiwan by the United States Department of State in the 2022 Trafficking in Persons Report*, pp. 16–17.
93. ILO, *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up*.
94. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights* (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (2009), E/C.12/GC/20, p. 4, <https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html>.
95. Baca, e.g. Hennebry, J. and H. KC, *Quarantined! Xenophobia and migrant workers during the COVID-19 pandemic* (2020), International Organization for Migration (IOM), <https://publications.iom.int/system/files/pdf/quarantined.pdf>; Katharine Jones, Sanushka Mudaliar and Nicola Piper, *Locked down and in limbo: The global impact of COVID-19 on migrant worker rights and recruitment* (2021), ILO, pp. 25–26, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms\\_821985.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_821985.pdf).
96. Felipe González Morales, *Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants* (2022), UN General Assembly, A/77/189, <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77189-report-special-rapporteur-human-rights-migrants>.
97. Baca Global Migration Group Working Group on Migration, Human Rights and Gender, *Principles and Guidelines migrants in vulnerable situations*, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), pp. 23–24, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf>; ILO, IOM, and OHCHR, *International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia (August 2001)*, IOM; United Nations, *Durban Declaration and Programme of Action*.
98. CESCR, *General comment No. 20*